

SUATU PEMIKIRAN BAGAIMANA DAPAT MENILAI IKLIM INVESTASI DI NEGARA-NEGARA ASEAN DAN ASIA UMUMNYA

J. PANGLAYKIM

1. ASIA TIDAK HOMOGEN

Benua Asia tidak homogen karena berbagai perbedaan di antara negara-negara di Asia, yaitu perbedaan sejarah, susunan masyarakat, sistem politik, tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi, jumlah penduduk, dan peranan bisnis. Bisnis internasional yang akan bergerak di Asia harus memperhatikan faktor-faktor ini untuk dapat berhasil dalam usahanya. Sejauh pengamatan penulis bisnis internasional cukup realistis dalam mengadakan penilaian mengenai situasi di benua ini, meskipun ada beberapa pihak yang tampaknya masih kurang "informed".¹

2. ASIA SEBAGAI SUATU "GROWTH AREA"

Kecuali Jepang yang sudah merupakan suatu kekuatan ekonomi raksasa, pada umumnya Asia dianggap merupakan suatu "growth area". Potensi yang dimiliki Asia telah menarik berbagai perusahaan internasional yang bonafide, kaum oportunis dan petualang untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Peristiwa yang masih segar dalam ingatan kita adalah pembentukan "giant paper enterprises" oleh beberapa petualang dalam bidang keuangan yang berhasil menarik uang dari publik melalui berbagai cara dan manipulasi,

¹Lihat kumpulan karangan Robert O. Tilman, Man, State and Society in Contemporary South East Asia, London, Pall Mall Press, 1969.

misalnya peristiwa Haw Par Brothers di mana Stater Walker dan kawan-kawannya mengambil peranan dan peristiwa terakhir yang dialami oleh Mosbert Group.

Asia sebagai "growth area" terutama dilihat dari segi potensi konsumen. Kalau di negara-negara industri konsumen sudah mencapai kejenuhan, sebaliknya pola dan jumlah konsumsi di Asia masih jauh daripada jenuh. Di negara-negara Barat konsumen adalah sekaligus akselerator dan merupakan salah satu "engine of growth" yang penting. Dewasa ini para konsumen di Eropa, Amerika dan di Jepang sudah memiliki lebih dari satu mobil, t.v., rumah, radio, dan sebagainya sehingga para produsen dihadapkan pada suatu pola konsumsi yang hanya dapat ditingkatkan melalui "hard pressed selling". Inipun tampaknya sudah mencapai tingkat kejenuhan. Di Asia jika tingkat pembelian para konsumen pada suatu saat meningkat hal ini berarti bahwa di Asiapun konsumen akan menjadi salah satu "engine of growth". Pada saat hal ini terjadi, usaha seperti manufacturing, bank, lembaga keuangan dan jasa-jasa lainnya akan dapat ikut menikmati perkembangan tersebut.

3. IKLIM INVESTASI DAN CARA MENILAINYA : SUATU PANDANGAN

Iklm investasi di negara Asia berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Perbedaan ini dapat dilihat dari sejarah, politik, ekonomi, struktur dan masalah-masalah berusaha (operating problems). Bisnis internasional yang hendak dan sudah berusaha di beberapa negara di Asia sudah memaklumi adanya perbedaan-perbedaan iklim investasi ini.

Pada suatu saat negara-negara di Asia bersaing untuk menarik para investor masuk ke masing-masing negaranya sehingga para investor dapat menarik keuntungan dari persaingan ini. Akan tetapi akhir-akhir ini khususnya negara-negara ASEAN sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan dan sudah dibentuk panitia untuk dapat menciptakan suatu pola dan kebijaksanaan investasi langsung untuk memberikan suatu package kepada para investor yang mungkin lebih menarik daripada saling bersaing.

a. Perspektif sejarah

Kebanyakan negara-negara Asia adalah bekas jajahan dan perekonomian nasional biasanya lebih diarahkan untuk kepentingan para penjajahnya. Kecuali Muangthai yang tidak pernah mengalami penjajahan, negara-negara ASEAN lainnya merupakan sumber bahan pertanian dan bahan-bahan mentah lainnya. Kalau sampai saat ini perdagangan di negara-negara ASEAN belum demikian berkembang antara lain disebabkan oleh akibat kebijaksanaan ekonomi penjajah-penjajahnya. Kecuali Singapura, sebagian besar perekonomian negara-negara ASEAN didasarkan atas pertanian. Dalam pembahasan ini penulis membatasi diri pada negara-negara ASEAN dan hanya menyinggung Asia pada umumnya dalam hubungan-hubungan tertentu. Secara sosial masyarakat Asia adalah suatu "plural society".¹

b. Aspek-aspek politis

Kestabilan, orientasi dan tata politik merupakan aspek-aspek yang harus diperhitungkan oleh bisnis internasional dalam menilai iklim investasi. Dalam hubungan ini sebaiknya kita tinjau orientasi negara-negara ASEAN, karena merupakan salah satu elemen penting dalam menilai aspek-aspek politis,

- i. Berdasarkan orientasi nasional dalam kaitannya dalam pengambilan keputusan negara-negara di Asia dibagi atas:
 - Yang berorientasi ideologis: Vietnam, Laos, Birma, Srilangka, Kamboja, RRC.
 - Yang berorientasi program: negara-negara ASEAN
 - Yang berorientasi bisnis: Jepang, Hong Kong termasuk Singapura.

¹ Alvin Rabushka dan Kenneth A. Shepsle, dalam bukunya Politics in Plural Societies, A Theory of Democratic Instabilities, Charles E. Merrill Publishing, 1969, "... a society is plural if it is culturally diverse and if its culture sections are organized into cohesive sections. The identification of a plural society, then, becomes a matter of observation. Politically organized cultural sections, communally based political parties, the partitioning of major social groups (e.g. labour unions) into culturally homogeneous subgroups, and political appeals emphasizing primordial sentiments serve as unambiguous indicators of a plural society".

- ii. ASEAN yang berorientasi program tidak saja hendak menciptakan suatu kerjasama yang lebih erat melalui proses perundingan, kebijaksanaan dan proyek-proyek bersama tetapi juga bertujuan menciptakan suatu kondisi untuk meningkatkan ketahanan nasional sebagai syarat pokok menuju kestabilan politik. Kestabilan politik pada tingkat nasional akan merupakan dasar dan jaminan ke arah kestabilan politik regional.

- iii. Dalam penilaian politis para penilai harus memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan dan masalah waktu (timing). Proses pengambilan keputusan berhubungan erat dengan susunan kekuasaan dan kaitan-kaitannya antara perorangan dan kelompok-kelompok di masyarakat, khususnya di beberapa negara ASEAN tertentu, jangan dilupakan "informal groupings" yang harus juga diperhitungkan dalam susunan kekuasaan dan proses pengambilan keputusan.

c. Aspek-aspek ekonomis

Aspek-aspek seperti ketidak-lancaran perekonomian, kekurangan devisa untuk pembiayaan impor, pembayaran jasa-jasa, ongkos-ongkos yang tinggi dalam perkembangan suatu usaha, kemungkinan adanya devaluasi, tingkat perkembangan atau pertumbuhan dan ekonomi tingkat teknologi turut menentukan usaha mempertinggi kestabilan dan ketahanan di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN pada umumnya belum memperlihatkan perkembangan ekonomi pada taraf yang sama. Negara-negara ASEAN (kecuali Singapura) adalah produsen-produk bahan mentah dan bahan-bahan industri. Singapura berusaha memperkembangkan diri sebagai pusat keuangan di Asia Tenggara dan telah berhasil menciptakan sarana-sarannya.

Yang penting bagi negara-negara ASEAN adalah komitmen negara-negara ASEAN sendiri untuk menciptakan suatu kerjasama regional yang dapat mempertinggi kapabilitas dan kapasitas nasional dan regional. Sebelum KTT ASEAN di Bali kerjasama ini belum tegas tetapi mulai terarah setelah Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi di Kuala Lumpur pada bulan Maret 1976 di mana disetujui untuk mengadakan feasibility studies proyek-proyek yang bersifat regional. Salah satu aspek yang dewasa ini belum memperoleh perhatian adalah mengadakan kaitan (link) antara sektor makro dan sektor mikro.

Salah satu akibat adalah adanya perbedaan besar antara kalkulasi harga pokok di antara negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan karena "equity-debt-ratio" lebih mengarah pada jumlah pinjaman yang lebih besar, yang berarti bahwa dalam kerjasama (joint venture) atau usaha sendiri, modal dari luar perusahaan merupakan komponen yang penting karena usaha itu memerlukan modal yang besar. Pada umumnya modal ini harus dipinjam dari lembaga-lembaga keuangan luar negeri atau perusahaan asing. Perse-tujuan dengan perusahaan atau bank Jepang biasanya dalam bentuk "package deal" dan jumlah bunga yang bersifat "compound" atau "tied up" akan menjadi cukup tinggi. Misalkan bunga resmi 10-12%, tapi dalam rangka "package deal" jika dikaitkan dengan pembelian mesin-mesin, bahan mentah dan sebagainya, pada akhirnya bunga akan mencapai + 50%. Demikian juga usaha nasional yang harus meminjam dari luar ASEAN atau Hong Kong. Ke-adaan ini akan sangat merugikan negara-negara ASEAN jika prinsip libera-lisasi perdagangan terus dilaksanakan. Hal ini juga dapat menimbulkan ketegangan antara perusahaan nasional dan joint venture yang mempunyai partner bonafide yang mampu memberikan harga pokok yang lebih kompetitif dibandingkan dengan usaha-usaha nasional yang tidak mempunyai access ke pasar uang internasional. Masalah ini sering kurang disadari kekompleksan-nya padahal sudah masanya diperlukan suatu kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.

d. Aspek struktural

Di sini para penilai mungkin dapat melihat masalah ini dari segi penghasilan negara yang masih sebagian besar diperoleh dari hasil per-tanian, belum adanya sarana yang baik dan kekurangan modal dalam negeri (mungkin ini tidak berlaku untuk Singapura) dan kurangnya tenaga-tenaga terdidik. Dalam rangka ini juga dapat dipelajari kebijaksanaan masing-masing negara dalam menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat struk-tural seperti pengalihan perdagangan transito ke industrialisasi, men-"tackle" proyek yang lebih besar secara regional dan sebagainya. Soal-soal struktural suatu negara sering menimbulkan kesulitan pada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di negara-negara tersebut kecuali

perusahaan-perusahaan Jepang yang biasanya paling mampu bertahan bahkan mencapai sukses dalam usaha-usahanya. Salah satu kesulitan yang dirasakan adalah kurangnya industri penunjang (supporting industries) meskipun sedikit demi sedikit mulai diatasi dengan adanya berbagai usaha swasta di bidang ini.

e. Masalah operasi (operating problems)

Yang termasuk dalam masalah ini adalah: peraturan yang seringkali berubah; peraturan yang mengatur pemilikan saham perusahaan atau joint venture; adanya industri yang tertutup untuk usaha luar negeri; adanya kemungkinan intervensi terlalu banyak dari instansi-instansi pemerintah; berbagai macam restriksi dan struktur bisnis di negara-negara ASEAN.

Melihat struktur dan organisasi bisnis di negara-negara ASEAN, sebagian besar usaha menengah dan besar (menurut ukuran ASEAN) masih dikuasai oleh kelompok atau keluarga dan belum ada pemisahan yang tegas antara pemilik dan "professional managers". Pengambilan keputusan dilakukan oleh pucuk pimpinan yang sekaligus adalah pemilik. Memang sudah ada beberapa perusahaan besar yang "has gone public", tetapi jika diteliti lebih lanjut sang keluarga masih menduduki posisi yang vital dan tenaga-tenaga profesional hanya diberi kedudukan teknis dengan atribut yang mentereng. Di sini terletak perbedaannya dengan perusahaan-perusahaan asing yang umumnya memakai tenaga-tenaga profesional. Struktur organisasi bisnis yang belum "public" ini merupakan salah satu masalah operasi (operating problems) yang sangat terasa misalnya di Indonesia, terutama jika pihak asing ingin mempertinggi equity atau mengadakan ekspansi. Situasi di Singapura mungkin agak berbeda di mana DBS ikut membantu mencari modal untuk equity.

Bisnis di Asia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok:

- i. Negara-negara dengan struktur bisnis yang sudah berkembang: Jepang, Hong Kong.

- ii. Negara-negara Asia dengan struktur bisnis yang masih berada dalam masa transisi dari usaha keluarga menjadi "public company"; seperti Singapura, Filipina, Malaysia dan Taiwan (di sini sektor pemerintah juga kuat)
- iii. Negara-negara Asia dengan struktur bisnis yang sebagian besar masih berada di tangan keluarga serta sektor perusahaan negara cukup kuat, misalnya Indonesia, Malaysia, Muangthai (mungkin lebih banyak perusahaan keluarga dan pejabat), India dan Korea Selatan
- iv. Negara-negara di mana sektor pemerintah merupakan sektor utama seperti India dan Birma.

4. SUATU IKHTISAR

Bisnis internasional yang yakin bahwa Asia/ASEAN (kecuali Jepang) "growth area" mempunyai potensi konsumen dan pasar selalu harus mengadakan penilaian tentang iklim investasi walaupun negara-negara yang bersangkutan berusaha menarik mereka dengan berbagai insentif. Berbagai aspek yang termasuk dalam penilaian adalah sejarah, politik, ekonomi, struktur dan masalah operasi.

Kestabilan politik, ekonomi dan sosial disertai dengan adanya usaha-usaha menghilangkan hambatan-hambatan struktural dan mengatasi kesulitan yang bersifat operasional merupakan pokok inti tiap penilaian bisnis internasional yang kemudian bersifat konseptual. Di sini kita hendak menekankan bahwa semua aspek yang dipandang penting oleh bisnis internasional sudah tercakup dalam dasar pemikiran negara-negara ASEAN, yaitu mempertinggi ketahanan nasional di mana elemen-elemen seperti kestabilan politik, ekonomi, menghilangkan secara bersama atau nasional hambatan-hambatan struktural, serta mengatasi kesulitan-kesulitan operasional merupakan prioritas utama dalam program setiap pemerintah. Orientasi pada program di negara ASEAN merupakan suatu jaminan bagi bisnis

internasional bahwa kawasan ASEAN akan merupakan suatu "growth area" yang segera akan menjadi kenyataan. Secara jangka pendek memang masih banyak hal-hal yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN, tetapi secara jangka panjang jika negara-negara ASEAN sudah mencapai momentumnya maka akan bergerak sangat cepat dibandingkan dengan negara-negara lain.